

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
TAHUN ANGGARAN 2019  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

*Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR RI:  
**Dra. Hj. Siti Masrifah, MA**  
Anggota Nomor: A-77*

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua,***

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang  
Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan  
Yang Terhormat, Saudari Menteri Keuangan RI  
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang APBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Perumusan kebijakan fiskal tahun 2019 melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilandasi spirit untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu diketahui bersama bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga untuk periode 2015-2019. FPKB memandang bahwa

pelaksanaan RAPBN 2019 ini wajib hukumnya bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam kondisi sesulit apapun, hal ini seperti terefleksi didalam kaidah fiqh “*maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*”.

Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2019 yaitu: "**APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia**", FPKB berharap bahwa kebijakan fiskal yang akan dieksekusi pemerintah nanti dapat menjadi stimulus yang nyata bagi pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. FPKB berpendapat bahwa perubahan fokus kebijakan fiskal pemerintah yang dalam empat tahun terakhir ini lebih berorientasi pada jangka menengah-panjang dengan menitikberatkan pembangunan infrastruktur menjadi berorientasi pada pembangunan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa harus di imbangi dengan penyusunan dan perencanaan APBN yang realistis dan pengelolaan yang kredibel.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan asumsi-asumsi makro yang melandasi penyusunan RAPBN 2019. Pemerintah juga secara konsisten mengikutsertakan indikator-indikator kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi yang inklusif. Menanggapi asumsi makro dan indikator kesejahteraan tersebut, FPKB mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap penetapan **asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen**, FPKB melihat ini sebagai keputusan yang moderat diambil oleh pemerintah, dimana target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tersebut justru turun 0,1 persen dibanding target APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Meski demikian, FPKB berpendapat target pertumbuhan tersebut dinilai lebih realistis melihat perkembangan dinamika ekonomi global dan domestik. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut FPKB mendorong kepada pemerintah segera memperbaiki kinerja ekspor nasional dan juga tingkat konsumsi rumah tangga dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, serta dukungan pertumbuhan investasi yang tinggi dengan menghilangkan segala hambatan birokrasi yang masih terjadi.
2. Terhadap penetapan **target inflasi sebesar 3,5 persen**, FPKB memandang bahwa untuk menjaga ekspektasi inflasi tersebut maka diperlukan adanya peningkatan sinergitas kebijakan antara Pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, yang ditunjang oleh penguatan pada sektor riil, sehingga hasil bauran kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas harga. Secara umum struktur inflasi di Indonesia masih akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu bahan pangan, energi, dan infrastruktur. Untuk itu problem ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan harus tetap menjadi prioritas

bagi pemerintah, sehingga FPKB mendukung upaya perbaikan sistem logistik nasional melalui pembangunan infrastuktur yang lebih baik.

3. Terhadap penetapan **tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen**, FPKB melihat target tersebut masih akan dipengaruhi berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Dari eksternal, keberlangsungan normalisasi kebijakan moneter The FED akan berdampak pada volatilitas aliran modal masuk, sedangkan dari sisi internal prospek perkembangan likuiditas domestik diharapkan dapat positif seiring mulai dalamnya pasar keuangan dalam negeri.
4. Terhadap penetapan asumsi **nilai tukar Rupiah sebesar Rp 14.400 per Dollar AS**, menunjukkan bahwa prospek nilai tukar mata uang Indonesia di tahun 2019 nanti mengalami pelemahan. Untuk itu FPKB mendesak pelaksanaan bauran kebijakan makroekonomi, fiskal dan moneter disertai perbaikan struktural di sektor keuangan, sehingga dapat berdampak positif dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, sebab diperkirakan setiap depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp.100 per dolar AS akan berpotensi menambah defisit pada APBN 2019 sekitar Rp.1,0 triliun – Rp.1,7 triliun.
5. Penetapan **harga minyak mentah Indonesia (ICP) oleh pemerintah sebesar US\$ 70 per barel** di tahun 2017 yang didasarkan pada perkiraan faktor fundamental dari pasokan minyak mentah dunia yang diperkirakan produksi minyak mentah akan lebih besar dibandingkan dengan permintaannya. FPKB secara khusus mendorong pemerintah agar penetapan ICP harus dapat memberi dampak positif bagi pos penerimaan negara, baik yang berasal dari PPh Migas dan PNBPN SDA migas.
6. FPKB berpendapat bahwa penetapan **lifting minyak bumi yang dipatok sebesar 750 ribu barel per hari (bph)** dan juga **lifting gas bumi sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (bsmph)** pada tahun 2019 ini harus bisa terealisasi, mengingat bahwa sudah beberapa tahun belakangan selalu meleset dari target yang ditetapkan. Untuk menghindari melesetnya realisasi target lifting minyak dan gas bumi ini maka FPKB mendukung agar upaya perbaikan iklim investasi dan skema kontrak bagi hasil dapat mendorong kegiatan eksplorasi serta menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS.
7. FPKB berpendapat agar bisa mencapai target **Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,8-5,2 persen** di dalam RAPBN 2019, maka pemerintah wajib mendorong kembali tumbuhnya industri manufaktur yang padat pekerja mengingat struktur lapangan kerja saat ini masih didominasi oleh sektor informal, serta memitigasi dampak dari revolusi industri dan teknologi terhadap tenaga kerja didalam negeri. Untuk **angka kemiskinan ditarget pada kisaran 8,5-9,5 persen**, FPKB memandang bahwa pencapaian tingkat kemiskinan Indonesia di bulan Maret 2018 mencapai 9,82 persen dapat dijadikan modal positif bagi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, apabila melihat pencapaian **gini rasio** bulan maret 2018 sebesar 0,389, maka dengan didukung kebijakan fiskal ekspansif harusnya gini rasio tahun 2019 bisa dipatok **0,37** persen, atau lebih rendah dari target RAPBN 2019 sebesar 0,38 persen. Terkait **target**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98**, maka FPKB mendorong pemerintah agar peningkatan IPM selain didukung membaiknya kualitas kesehatan, pendidikan, namun juga fokus kepada standar hidup layak (*decent standard of living*) dengan semakin naiknya *purchasing power parity* masyarakat, terutama bagi 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Setelah mencermati postur RAPBN tahun 2019 yang diajukan oleh pemerintah, maka FPKB memandang perlu memberikan beberapa catatan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Target **Pendapatan Negara** dalam RAPBN TA 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun atau meningkat sebesar 12,6 persen dari *outlook* tahun 2018. **Penerimaan Perpajakan** diperkirakan naik sebesar 15,0 persen, mencapai sebesar Rp 1.780,9 triliun, atau berkontribusi 83,1 persen terhadap pendapatan negara. Selanjutnya untuk **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** ditargetkan meningkat sebesar 3,4 persen, mencapai sebesar Rp 361,1 triliun, atau berkontribusi 16,9 persen terhadap pendapatan negara, serta **Penerimaan Hibah** ditargetkan sebesar Rp 0,4 triliun, atau turun 91,9 persen jika dibandingkan outlook tahun 2018.

FPKB memandang naiknya target penerimaan perpajakan ditahun 2019 tersebut menunjukkan optimisme pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional agar tidak tergantung pada pembiayaan yang bersumber dari pinjaman maupun utang. Pemerintah dituntut harus lebih selektif dalam memberikan insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* serta *tax expenditure* mengingat dalam implementasinya beresiko terjadinya inefisiensi dalam peningkatan penerimaan negara. Melalui perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi dan teknologi perpajakan, maka FPKB meminta pemerintah untuk terus meningkatkan rasio pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (*tax buoyancy*) yang sampai sekarang masih rendah atau dibawah angka 1, serta meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) mencapai kisaran 13-14 persen, atau lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 12,1 persen dalam RAPBN 2019.

FPKB juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang memadai. Pendapatan cukai ditargetkan naik 6,4 persen dari *outlook* tahun 2018 menjadi sebesar Rp 165,5 triliun dengan kontribusi terbesar dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Namun demikian, kenaikan tarif cukai hasil tembakau tersebut harus tetap memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan serapan tenaga kerja industri tembakau, untuk itu FPKB mendukung langkah pemerintah dalam melakukan ekstensifikasi pajak dengan menambah objek Barang Kena Cukai (BKC) lagi.

Di sisi lain, PNBPN ditargetkan mencapai Rp 361,1 triliun atau naik 3,4 persen dari *outlook* tahun 2018. Secara khusus, FPKB berpendapat bahwa PNBPN SDA Migas masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan lifting migas dengan penerapan teknologi terkini yang tepat guna serta implementasi penerapan *Production Sharing Contract* (PSC) dengan skema *gross split* menggantikan mekanisme *cost recovery* yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Lebih lanjut, FPKB menghimbau agar PNBPN yang berasal dari dividen BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditargetkan meningkat 2,0 persen dan 10,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2018 agar bisa dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha BUMN maupun BLU serta tetap memperhatikan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kebijakan **Belanja Negara** dalam RAPBN Tahun 2019 untuk mencapai pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan pemerintah yang direncanakan sebesar Rp 2.439,7 triliun yang terbagi atas dua komponen yaitu anggaran **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp 1.607,3 triliun dan anggaran **Transfer ke Daerah dan Dana Desa** sebesar Rp 832,3 triliun, harus diupayakan tepat sasaran untuk mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. FPKB secara tegas meminta pemerintah terus meningkatkan tatakelola keuangan negara yang lebih akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dirancang berdasarkan prinsip *money follow program*, sehingga juga dapat mengatasi melesetnya pencapaian penyerapan anggaran belanja negara, terutama capaian belanja K/L yang selalu dibawah target yang ditetapkan.

Secara khusus FPKB mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengarahkan belanja pemerintah pusat tahun 2019 kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang difokuskan di bidang pendidikan dan perlindungan sosial. Selain melanjutkan program-program dibidang pendidikan yang sudah berjalan seperti PIP, BOS, beasiswa dan vokasi, FPKB sekali lagi mendesak pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran pendidikan untuk **madrrasah dan pesantren** di Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing SDM dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Terkait rencana pemerintah untuk menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar 5 persen serta tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 dan THR di RAPBN 2019, FPKB berpendapat kebijakan ini harus disertai dengan penilaian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan tersebut, dengan kinerja yang lebih profesional dan disiplin yang tinggi. Selain itu, untuk mendorong transformasi perbaikan kualitas belanja negara, maka FPKB mendorong pemerintah agar meninjau kembali besarnya alokasi belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2019 yang termasuk *nondiscretionary spending* lainnya, seperti untuk **pembayaran bunga utang** sebesar Rp.275,4 triliun atau naik 10,4 persen dibandingkan *outlook* APBN tahun 2018.

Selanjutnya untuk kebijakan **subsidi**, FPKB mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi listrik sebesar 97 persen dengan pemberian lanjutan subsidi untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA.

Sedangkan terkait subsidi pupuk yang akan didorong penyaluran penerima subsidi diselaraskan dengan NIK dan juga pemakaian kartu tani, FPKB memandang harus diiringi dengan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan single database NIK terlebih dahulu, agar benar-benar tepat sasaran.

Mengenai alokasi anggaran **Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa** yang direncanakan sebesar Rp 832,3 triliun atau meningkat 9,0 persen dari *outlook* tahun 2018 harus diupayakan tepat sasaran dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. FPKB secara spesifik memandang bahwa kewajiban penggunaan minimal 25 persen anggaran dari Dana Transfer Umum untuk mendanai belanja infrastruktur disatu sisi akan mempercepat pemenuhan layanan dasar publik di daerah, tetapi juga akan berdampak pada ruang fiskal daerah yang juga menyempit. Terkait anggaran **Dana Desa** sebesar Rp.73 triliun dalam RAPBN 2019 atau meningkat 21,7 persen dari *outlook* tahun 2018, FPKB meminta agar implementasi pengalokasian Dana Desa di tahun kelima -nya nanti dapat difungsikan sebagaimana mestinya yaitu untuk mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan *road map* pengalokasian Dana Desa yang disusun Pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. FPKB memandang bahwa Kebijakan **Defisit dan Pembiayaan Anggaran** pada RAPBN 2019 sebesar defisit 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebanding dengan nominal Rp.297,2 triliun merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Rencana pemerintah untuk mengambil pembiayaan defisit anggaran lewat sumber pembiayaan utang dengan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN neto) sebesar Rp. 386,2 triliun di tahun 2019 agar terus memperhatikan *volatilitas* perkembangan pasar SBN dalam negeri dan mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya *sudden reversal* atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba, mengingat sampai pertengahan Agustus 2018 ini porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan sudah mencapai 37,54 persen atau sebesar Rp. 854,84 triliun. Terakhir FPKB berpendapat bahwa pembiayaan investasi kepada BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, BLU dan Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional harus diarahkan agar dapat memberi hasil dan nilai tambah, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar RUU APBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Amin.

***Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 28 Agustus 2018

**PIMPINAN,  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**

**H. Cucun Ahmad Syamsurizal S.Ag**